

ANALISA SINGKAT TENTANG PROVOKATOR KERUSUHAN

Oleh : Brigjen. Pol. Drs. Togar M. Sianipar
Kadispem Polri

PENDAHULUAN

Sebutan masyarakat Indonesia yang ramah tamah agaknya mulai luntur. Bumi Nusantara yang katanya 'ijo royo-royo' dan 'tata tentrem kertaraharja' kini ibarat seenggok rumput kering yang mudah terbakar. Rasa persaudaraan dan ikatan tali adat istiadat serta falsafah 'Bhineka Tunggal Ika' yang mengikat kehidupan bersama saat ini begitu mudahnya dirobek-robek. Maka tidak heran jika tongkat kayu dan batu berubah menjadi senjata yang saling m e n i k a m , menghancurkan dan membunuh sesamanya.

Tidak kalah mustahilnya, prahara itu justru muncul di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal damai dan masyarakatnya hidup berdampingan dalam kebhinekaan. Anahnya lagi,

kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa dan hangusnya sarana infrastruktur dan suprastruktur itu hanyalah sebuah isu. Khususnya isu SARA agaknya tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia saat ini.



Begitu mudahnya masyarakat kita termakan oleh isu atau rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tentunya ini juga menandakan betapa pintarnya para pelaku penyebar isu memanfaatkan potensi

konflik yang memang sudah ada ditengah masyarakat kita. Dari beberapa amuk massa (kerusuhan) yang telah terjadi, didapat petunjuk bahwa sebelum kejadian ada beberapa orang yang memang melakukan kasak-kusuk menyebarkan berita bohong. Menyebarkan fitnah yang keji, sehingga

untuk segelintir warga yang memiliki pikiran pendek mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkis.

Ketrampilan kelompok penyebar isu itu, untuk memanfaatkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sudah sangat teruji dengan baik. Setidak-tidaknya beberapa kerusuhan telah terjadi, bahkan terkesan silih berganti di beberapa daerah. Kejadiannyapun hanya selang beberapa minggu saja. Semua itu merupakan bukti dan hasil dari pekerjaan para penyebar isu.

Selanjutnya para penyebar isu itu, lebih dikenal lagi setelah penggunaan kata-kata 'provokator' lebih dimasyarakatkan lagi. Penggunaan kata 'provokator' akhirnya seperti menjadi bahasa resmi bagi orang-orang yang menyebarkan fitnah, isu, rumor yang sifatnya merusak dan mengadu domba antar warga yang satu engan yang lain.

PROVOKATOR

Setelah kota Ambon dilanda kerusuhan, terdengar kabar angin para provokator pindah ke pulau Sulawesi. Sekitar 300 provokator dari luar masuk ke Sulawesi Utara dan 200 provokator lagi ke Sulawesi Selatan. Kabarnya mereka ingin melakukan kerusuhan di dua daerah itu. Aparat keamanan mendengar berita

tersebut segera bersiaga menjaga segala kemungkinan. Di sudut-sudut kota Manado, tampak terlihat para personel ABRI berjaga-jaga. Tetapi ternyata kabar itu hanya isu belaka, daerah-daerah yang disebut-sebut itu aman-aman saja. Namun kabar datangnya para provokator seakan-akan benar. Setelah pada hari Rabu, Gereja Khatolik di Jln. andalas, Ujung Pandang, dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal. Pintu depan gereja sempat terbakar. Jauh sebelumnya, Gereja Khatolik di Jln. Santo Yoseph dikirim peti mati berisi patung Bunda Maria. Sedangkan di Manado, petugas kepolisian menciduk sebanyak sepuluh pendatang tanpa identitas. Setelah diperiksa, enam orang itu dilepas karena tidak ada cukup bukti.

Demikianlah, provokator itu bagaikan virus. Cepat menular dan menular. Kasus Ketapang, terjadi 22 Nopember 1998. Beberapa preman memukuli penduduk sehingga babak belur. Pemukulan berubah menjadi kerusuhan setelah ditingkahi sekitar 200 preman menyerang rumah penduduk di sekitar daerah Ketapang. Lalu penyerangan itu dibalas ratusan orang yang diketahui bukan asli orang daerah Ketapang, melainkan daerah Tanjung Priok dan Tangerang.

Cuma berselang beberapa hari,

kerusuhan terjadi di Kupang (NTT). Tidak ada sebulan kemudian, kota Karawang rusuh, 8 Januari 1999. Sebelas hari kemudian kerusuhan meledak di Ambon, Maluku. Dari kasus Ketapang sampai kasus kerusuhan di Ambon, pola provokasinya sama. Aparat keamanan bukannya berdiam diri saja tetapi telah melakukan tindakan-tindakan yang jelas. Dalam setiap kerusuhan aparat keamanan telah melakukan penangkapan, tetapi sebagian besar setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama tidak terdapat bukti-bukti. Sehingga harus dilepaskan demi hukum. Alasannya biasa, mereka adalah massa yang hanya ikut-ikutan. Aparat Kepolisian memang memiliki tersangka, namun tersangka penganiayaan atau penjarahan.

Kasus Ketapang, misalnya. Kepolisian berhasil menangkap 186 preman yang kebetulan berasal dari Suku Ambon, Maluku, 14 orang diantaranya menjadi tersangka penganiayaan dan kini BAP-nya sudah dikirim ke Kejaksaan. Sisanya dilepas karena kurang bukti dan cuma ikut-ikutan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya provokator.

Demikian pula kasus kerusuhan di Ambon, Maluku. Polda Maluku berhasil menangkap beberapa tersangka provokator. Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa mereka hanya provokator tingkat pelaksana dan pada umumnya mereka tidak mengetahui dan tidak mengenal provokator yang lain. Gerakan tutup mulut diantara mereka ketika dilakukan pemeriksaan, juga sangat menyulitkan

PENANGANAN PROVOKATOR DI BEBERAPA KERUSUHAN

NO	KERUSUHAN	DIPERIKSA	PROVOKATOR	PERUSAK/PENJARAH
1	KETAPANG	186 Orang	BELUM TERUNGKAP	14 Orang
2	KUPANG	61 Orang	8 Orang	60 Orang
3	KARAWANG	78 Orang	1 Orang	26 Orang
4	AMBON	90 Orang	50 Orang	37 Orang

* Sumber : Tabloid "ADIL" terbitan tanggal 3 - 9 Pebruari 1999

aparatus Kepolisian. Sampai sekarang belum ada provokator yang masuk ke pengadilan.

Namun, Menteri Kehakiman RI, Prof Muladi, SH segera membantah sinyalemen seakan-akan para provokator itu seperti 'untouchable' (tidak tersentuh hukum). Menurut Menteri Kehakiman, dalam KUHP ada pasal yang mengatur tentang provokator yakni : *"Mereka yang memberikan informasi sesat, memberikan fasilitas sarana untuk terjadinya kejahatan serta mereka yang mempergunakan pengaruhnya agar suatu kejahatan bisa terjadi."*

Tetapi seperti yang telah diketahui bersama, untuk menangkap orang dan mengajukannya ke Pengadilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Asas praduga tidak bersalah, merupakan pegangan pertama dari aparat Kepolisian dalam melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan suatu kasus. Selain itu tanpa bukti-bukti yang cukup, aparat Kepolisian tidak mempunyai hak untuk mengajukan seseorang ke pengadilan sebagai provokator.

Dari uraian diatas disadari bahwa penanganan para provokator sampai pada taraf siapa dalang sesungguhnya, bukanlah suatu hal yang mudah. Namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat

diatasi. Mungkin masih memerlukan waktu yang panjang untuk mengungkapnya. Tetapi yang mendesak sekarang, bagaimana cara agar kejadian amuk massa tidak terjadi lagi di daerah lainnya. Tentunya hal ini kembali kepada kemampuan aparat negara sebagai penegak hukum untuk mencari bukti-bukti keberadaan provokator dan kemampuan daya tangkal masyarakat untuk menangkis dan menyaring segala isu-isu yang beredar di lingkungannya.

Berikut ini beberapa ulasan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan para provokator berdasarkan saksi mata di lapangan maupun hasil analisis dari beberapa sumber yang terurai di berbagai mass media cetak terbitan ibukota.

Mengenal Provokator

Kata 'Provokator', belakangan ini bisa jadi merupakan kata-kata yang populer. Bahkan, lebih dari sekedar kata, provokator sudah menjadi personifikasi khusus bagi setiap kejadian rusuh, dimana ada kerusuhan maka kata-kata 'provokator' pasti ikut menyertainya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata 'Provokator' adalah sebutan bagi orang yang melakukan provokasi terhadap perorangan atau sekelompok orang. Sedangkan, provokasi sendiri merupakan pancingan atau tantangan.

Namun dalam kamus tersebut tidak merinci hal ihwal dan rincian sang provokator. Jadi siapa saja sebenarnya bisa dan dapat menjadi seorang provokator.

Meskipun demikian, kini provokator tidak lagi hanya ada di dalam kamus belaka. Dia berubah menjadi suatu hal yang realitas dan bisa dirasakan kehadirannya walaupun sampai sekarang wujudnya belum diketahui. Meskipun misterius, orang menganggapnya ada. Setiap kali menyebut kata provokator, imajinasi masyarakat pasti mengarah ke peristiwa-peristiwa kerusuhan.

Tengok saja ketika kerusuhan 14 Mei 1998 terjadi. Saat itu sebelum emosi massa tidak terkendali lagi, merusak, membakar lalu membakar pertokoan, ulah provokator terlihat jelas. Dibeberapa tempat, massa sedikit demi sedikit berkumpul, yang tadinya hanya berada di beberapa titik tertentu ternyata lama kelamaan bertambah banyak. Lalu, tanpa sadar ada yang mengipasi, mereka hanyut dalam gelombang emosi. Massa mengepung pertokoan dan menguras isinya. Tiba-tiba api menjilati gedung-gedung yang porak poranda diterjang aksi penjarahan. Api berkobar dimana-mana, namun sang provokator sudah tidak ada di tempat. Hilang entah

kemana. Selanjutnya yang terlihat adalah puing-puing gedung yang hangus terbakar, bangkai mobil dan motor, maupun sisa barang dagangan yang porak-poranda akibat amukan massa.

Jika kita kumpulkan informasi di lapangan ketika aksi demonstrasi sedang marak-maraknya, baik dari petugas dalmas (pengendalian masyarakat) yang sehari-harinya memang khusus menangani berbagai aksi kerusuhan maupun informasi dari masyarakat yang kebetulan menyaksikan kejadian, maka didapat beberapa keterangan. Sebelum terjadi aksi kerusuhan maupun bentrokan para demonstran dengan petugas, beberapa orang yang tidak dikenal melakukan aksi provokasi baik kepada petugas maupun kepada demonstran. Aksi tersebut diantaranya dengan memanas-manasi demonstran untuk melakukan aksi fisik dengan petugas, mereka berteriak-teriak dengan kata-kata kotor dan tidak sopan seakan sengaja menantang petugas untuk bentrok dengan demonstran. Ketika situasi tidak terkendali lagi, bentrokan telah terjadi, mereka pun menghilang. Keadaan seperti itu terlihat jelas ketika kejadian bentrok demonstran dengan petugas yang terjadi di jalan Sudirman Jakarta Pusat, yang kemudian dikenal dengan sebutan 'Tragedi Semanggi'. Petugas

tidak mungkin dapat mengenali siapa provokator tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti melalui rekaman video, mereka telah bercampur dengan kelompok demonstran. Mereka menggunakan seragam yang biasa dipergunakan para demonstran, bahkan diantaranya ada yang menggunakan penutup muka dan memakai helm pengendara motor untuk menutupi identitasnya.

Hasil kerja para provokator lainnya juga terlihat jelas ketika beberapa kerusuhan terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia ini. Seperti kejadian di kota Ambon, Maluku, puluhan jiwa melayang dan ratusan rumah musnah terbakar sehingga ribuan orang terpaksa menjadi pengungsi. Aksi para provokator kali ini tidak memanas-manas para demonstran, tetapi mereka menggunakan teknik dan cara lain yaitu mereka dengan sabar mengembuskan isu-isu SARA di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika ada letupan kecil saja di masyarakat, maka akibatnya akan menimbulkan gelombang amuk massa yang sedemikian besarnya dan akibatnyaupun sampai kini masih terasa masih meninggalkan trauma rasa takut diantara warga kota Ambon.

Sebelum kerusuhan terjadi, telah beredar

di tengah-tengah masyarakat rumor-rumor yang bernuansa SARA. Diantaranya, isu yang menyebutkan ada warga muslim yang dianiaya warga Kristen hingga tewas, sampai isu yang menyebutkan ada Gereja yang dibakar umat Islam. Padahal rumor yang beredar diantara warga Muslim justru sebaliknya. Ada warga Muslim yang dianiaya warga Kristen dan ada Masjid yang dibakar warga Kristen. Penyebaran isu-isu yang demikian itu ternyata cukup ampuh untuk membangkitkan emosi warga kota Ambon, sehingga terjadi amuk massa yang tidak terkendali lagi. Selanjutnya sudah diketahui, puluhan korban jiwa berjatuh, miliaran rupiah nilai kerugian material, belum lagi trauma masyarakat yang berkepanjangan dan sulit untuk direhabilitasi.

Ciri-Ciri Provokator

Dari beberapa kerusuhan yang telah terjadi, maka didapat beberapa informasi baik dari media massa, masyarakat maupun dari petugas Dalmas Polri di lapangan. Hasil pengumpulan keterangan setelah melalui pengolahan dan analisis maka didapat ciri-ciri provokator sebagai berikut :

Ciri-ciri Provokator Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.

PROVOKATOR KERUSUHAN 13-15 MEI 1998 DI JAKARTA

CIRI - CIRI	CARA - CARA
1	2
<p>a. Jumlah provokator di masing-masing tempat (daerah) antara 3 sampai 10 orang. Pelaku berpakaian rapi, biasa dan berbeda dengan penjarah</p> <p>b. Bertampang preman dengan ciri-ciri, agak tinggi berambut cepak/cepat dan naik sepeda motor.</p> <p>c. Pelaku membawa tas ransel (tas punggung) isinya, bensin dibungkus plastik dan batu yang dibungkus plastik.</p> <p>d. Sebagian ada yang memegang alat komunikasi HP (Hand Phone) dan HT (Handy Talky).</p> <p>e. Agar penyamarannya tidak ketahuan, diberpa lokasi mereka memakai jaket atau seragam SMU/SLTA tanpa badge (kecuali badge OSIS di bagian dada kiri) memakai celana blue jean (sebagian lusuh dan sobek-sobek).</p> <p>f. Dari pengamatan fisik tubuh, tampak berotot dan terlatih (tidak selalu berbadan kekar).</p> <p>g. Di Jln. Letjen Suprpto TGPF mendapatkan tiga orang ciri-ciri provokator (dua lelaki dan satu wanita). Berpakaian biasa, celana pendek menggunakan bahasa isyarat dengan lambaian tangan, tanda 'ya dan 'tidak' untuk mengomandoi pembakaran, penjarahan atau pengrusakan. Bertopi, rambut gondrong, membawa pentungan. Kulit kuning bersih, bertopi merah, memakai kaos putih, bersepatu coklat, sabuk hitam, mengangkat kedua tangan ke atas tanda victory atau kemenangan</p>	<p>a. Membakar ban karet (mobil, motor) membakar sepeda motor, mobil dan melepas selang bensin serta membakarnya.</p> <p>b. Membuat bom molotov cocktail, membakar serta melemparkannya.</p> <p>c. Merusak atau menghancurkan barang atau bangunan/gedung seperti membongkar paksa pintu "rolling door" kaca tebal dan lain-lain.</p> <p>d. Mengintegrasikan diri ke kumpulan massa. Kemudian meneriakkan yel-yel Anti Polisi, Anti ABRI, Anti Cina dan meneriakkan kata-kata pengecut kepada mahasiswa.</p> <p>e. Datang dalam bentuk kumpulan dan langsung melakukan pengrusakan, baru kemudian menarik massa yang lain. Yang hampir jelas adalah perusuh memainkan peran utama dalam merangsang dan memotivasi serta memobilisasi massa yang lebih besar untuk melakukan kerusuhan.</p> <p>f. Kerumunan massa pasif diprovokasi lalu diarahkan ke tempat-tempat strategis, simbol-simbol kekayaan (pertokoan, swalayan, bank, pasar, gedung yang berisi barang yang dapat dijarah) dan simbol-simbol kekuasaan : markas Polisi, kendaraan Polisi dan lain-lain.</p>

* Sumber : Tabloid "BANGKIT" Terbitan Tanggal 1 - 7 Pebruari 1999

Ciri-ciri Provokator Kerusuhan di Solo

PROVOKATOR KERUSUHAN DI SOLO (14-15 MEI 1998)

CIRI - CIRI	CARA - CARA
1	2
<p>a. Jumlah antara 5 sampai 15 orang.</p> <p>b. Memprovokasi kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju sasaran lain.</p> <p>c. Mereka ada yang naik becak, ada yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar motor bebek.</p> <p>d. Menutup wajah dengan kain semacam sapu tangan besar agar mukanya tidak kelihatan. Ada yang mukanya dicoreng moreng.</p> <p>e. Menggunakan bahasa Indonesia sebagian lagi memakai logat Betawi, bukan bahasa Jawa.</p> <p>f. Tampak terlatih, sigap, dan rapi dalam melakukan kerjanya termasuk memobilisir massa.</p> <p>g. Ada yang berambut cepak, ada yang gondrong dan ada pula yang kerempeng.</p>	<p>a. Kelompok pertama melakukan pelemparan-pelemparan di suatu lokasi. Jumlahnya sekitar 5 sampai 15 orang. Ada yang berkendara motor, mereka melwati depan markas keamanan.</p> <p>b. Cekatan dan rapi juga terlatih. Kelompok provokator ini merupakan misteri didalam kerusuhan di Solo.</p>

* Sumber : Tabloid "BANGKIT" Terbitan Tanggal 1 - 7 Pebruari 1999

Ciri-ciri Provokator Kerusuhan di Ketapang

PROVOKATOR KERUSUHAN DI KETAPANG (22 NOPEMBER 1998)

CIRI - CIRI		CARA - CARA		
1		2		
a. Para preman menggunakan ikat kain warna merah dan kuning di lengan.	b. Senjata yang digunakan, pedang, samurai dan seragam yang tampak masih baru.	c. Disetiap saku mereka diketemukan kartu tanda anggota kelompok tertentu.	a. Mereka mendapat uang dari seorang bos sebesar Rp. 500.000,- untuk satu nyawa. Tapi kalau hanya sekadar melukai Rp. 250.000,- imbalannya.	b. Sdr Tahar Manahan Manulang, salah satu preman berhasil ditangkap lalu diinterogasi warga mengaku dibayar Rp. 40.000,- oleh Bos C & C (tempat hiburan) untuk menyerbu warga kampung. Ia kemudian tewas dibantai warga.

* Sumber : Tabloid "BANGKIT" Terbitan Tanggal 1 - 7 Pebruari 1999

Ciri-ciri Provokator Kerusuhan di Ambon

PROVOKATOR KERUSUHAN DI AMBON (19-22 JANUARI 1999)

CIRI - CIRI		CARA - CARA	
1		2	
a. Memakai ikat kepala warna merah ciri khas RMS. Ciri-ciri tersebut terlihat ketika para preman memeras para pemilik toko.	b. Pelaku meneriakkan RMS.	Menghasut dan mengadu domba antar umat beragama. Seperti, ada gereja yang dibakar umat Islam atau ada masjid yang dibakar umat Kristen.	

* Sumber : Tabloid "BANGKIT" Terbitan Tanggal 1 - 7 Pebruari 1999

Asumsi Provokator.

Beberapa asumsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat melalui komentar dan pendapat yang

diutarakan beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh LSM, diantaranya yaitu:

Koordinator "KONTRAS", Munir SH mengutarakan pendapatnya di Tabloid "BANGKIT" terbitan tanggal 1 - 7 Pebruari 1999, diantaranya yaitu :

NO	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	POTRET DIRI PROVOKATOR	<p>a. Provokator yang tertangkap adalah provokator level bawah. Mereka bukan yang membangun 'conditioning' masyarakat dalam situasi yang sangat terbuka dan saling berhadapan.</p> <p>b. Provokator di level bawah ini macam-macam mulai dari kelompok kriminal, sampai aparat di kapangan tingkat bawah.</p> <p>c. Provokator adalah orang yang membangun 'contioning' menciptakan suasana konflik horisontal. Misal : mereka yang mengintroduksi problem agama pada pro kontra Sidang Istimewa yang lalu. Itu bentuk provokasi yang 'contioning'. Itu banyak sekali dan ini levelnya adalah para elit politik.</p> <p>d. Provokator jalanan. Merekalah yang pegang batu dan meneriakkan macam-macam hasutan.</p>
2.	KEKUASAN PROVOKATOR	<p>a. Provokator di level atas tidak pernah terungkap secara konkret karena memang tidak ada kekuatan dan kemauan politik cukup besar dari para elite politik.</p> <p>b. Provokator level atas berada di lingkaran yang cukup kuat di pusat-pusat kekuasaan.</p> <p>c. Kemandulan untuk mengungkap itu terjadi karena memang dekatnya para pemain di tingkat atas tadi dengan pusat-pusat kekuasaan.</p> <p>d. Karena tidak pernah diusut secara jelas siapa provokatornya, akhirnya berhenti di komoditas perang opini publik antara elit politik sendiri.</p>

NO	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
4.	SOLUSINYA	<p>b. Kedua juga butuh defensif. Jadi defense terhadap posisi lama yang akan hilang. Itu dicoba untuk dikembalikan dengan pertikaian-pertikaian politik dalam bentuk semacam itu.</p> <p>c. Jadi motifnya bisa macam-macam. Dan permainan politik kerusuhan semacam itu memang cenderung berlangsung ketika tingkat desak mendesak politik di tingkat atas juga kuat.</p> <p>Diperlukan keberanian dan kemauan politik dan 'concern' terhadap upaya memperbaiki keadaan bernegara secara keseluruhan.</p>

Direktur PBHI, Hendardi, SH yang dimuat di Tabloid "BANGKIT" tanggal 1 - 7 Februari 1999 mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
1.	POTRET DIRI PROVOKATOR	<p>a. Masyarakat kita kini sedang dalam keadaan dan situasi yang rentan secara politik. Dalam masyarakat yang rentan sangat memungkinkan provokator bermain dalam kerusuhan untuk kepentingan politik mereka.</p> <p>b. Provokator hendaknya diasumsikan bahwa provokator itu jelas bukan dari golongan masyarakat biasa. Tetapi dari kelompok masyarakat secara ekonomi dan politik yang memiliki kekuatan cukup.</p> <p>c. Karena kerusuhan berada di mana-mana, ini pasti kelompok yang dominan secara ekonomi maupun politik. Mereka melakukan provokasi lewat kerusuhan-kerusuhan.</p>

NO	IDENTIFIKASI	KETERANGAN
2.	PENGGUNA PROVOKATOR	<p>a. Struktur organisasi dan provokator bukan masyarakat biasa. Sebab masyarakat kita ini masyarakat yang tidak berdaya.</p> <p>b. Mereka yang mengendalikan ini pasti memiliki kekuatan politik dan ekonomi. Para provokator dan operator di lapangan itu mempertaruhkan nyawa. Sehingga tentunya ada imbalan yang cukup diterima provokator. Kalau untuk sekedar iseng atau spontan hampir tidak mungkin. Memang ada di beberapa daerah yang bersifat spontan, tetapi secara umum tidak spontan.</p> <p>c. Agak sulit untuk mengungkap orang yang berpeluang memainkan peran provokator.</p> <p>d. Beberapa peristiwa kerusuhan yang terjadi seperti Karawang, Ketapang, Kupang dan Ambon diduga memiliki rangkaian bahwa itu semua memang direncanakan, lewat provokasi oleh kelompok terorganisir dan terlatih.</p>
3.	SOLUSINYA	<p>a. Tidak cukup hanya sekedar mencari, menangkap, menghakimi provokator, tetapi lebih jauh lagi adalah melacak aktor intelektualnya dan motif politik di belakang kegiatan mereka. Tanpa melihat itu semua, kita masih akan melihat kerusuhan di berbagai tempat.</p> <p>b. Cara lainnya, yaitu dengan memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri, masyarakat terlibat penuh dalam partisipasi politik, sehingga menjadi kekuatan yang bisa menjaga dirinya sendiri terhadap adanya upaya provokasi. Itu bisa dilakukan bila telah terbentuk masyarakat yang demokratis, penegakan supremasi hukum, tidak lagi menggantungkan keselamatan kita terhadap aparat keamanan</p>

TINDAKAN APARAT PENEGAK HUKUM

Para perusuh dan provokator yang menciptakan kekacauan di berbagai daerah dan kerap kali menghantui masyarakat dengan perasaan ketakutan, kini tidaklah sebebaskan dahulu dalam beraksi karena bahaya besar kini menghadang mereka. Ancaman bagi perusuh dan provokator ternyata tidak tanggung-tanggung, ancaman itu datang dari Satuan Tugas Khusus ABRI. Satuan tugas khusus tersebut lebih mirip seperti pemukul reaksi cepat, yang dalam waktu dekat akan dibentuk ABRI. Satuan tugas ini perlu dibentuk, sebab jika mengandalkan aparat-aparat penegak hukum di wilayah daerah, maka akan kewalahan. Terobosan lain yang lebih hebat lagi, ABRI akan mengambil tindakan mulai dari preventif hingga mengusut tuntas, dengan ancaman tembak ditempat.

Sebagai aparat penegak hukum, ABRI terutama Aparat Kepolisian telah diinstruksikan secara khusus untuk tidak mentolerir sama sekali pelanggaran hukum, apapun bentuknya dan dimanapun dilaksanakan. Tindakan tegas serta tidak ragu-ragu untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-

perbuatan perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang nyata-nyata tidak mengindahkan hukum dan jelas merugikan rakyat banyak.

Perintah tindakan tegas dan pembentukan satuan khusus itu dikeluarkan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, sesuai dilaksanakan RAPIM ABRI di Jakarta, tanggal 6 Pebruari 1999. Instruksi tegas ini sendiri, telah dijelaskan Menhankam/Pangab dalam pertemuan "Commander Calls" di Cilangkap Mabes ABRI tanggal 4 Pebruari 1999 yang lalu. Dalam acara "Commander Calls" itu, dihadiri para Penglima Utama (Kotama) seperti Pangdam, dan Kapolda seluruh Indonesia. Pertemuan itu dilanjutkan berupa Rapat Pimpinan ABRI terbatas untuk membicarakan peningkatan kesiagaan dan kesiapan operasional ABRI menghadapi situasi yang berkembang saat ini, sekaligus dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 1999 dan Sidang Umum 1999 yang akan datang.

Poin yang penting dari rapim ABRI ini adalah dimaklukkannya perang dengan penjahat, terutama para perusuh. Keputusan tegas yang memang telah dinanti-nanti masyarakat itu, sebagai

implementasi terhadap hasil evaluasi situasi sekarang. Situasi dan kondisi saat ini menyiratkan telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum yang dilakukan masyarakat di beberapa daerah. Hukum yang harus ditegakkan, hukum yang merupakan suatu kualitas dari suatu negara hukum, hukum yang seharusnya ditaati serta dihormati saat ini telah banyak dilecehkan.

Tidak itu saja, kecuali melanggar hukum dan mematahkan rambu-rambu hukum untuk kepentingan tertentu, aparat hukum pun telah dilecehkan, dilawan dan dihina sedemikian rupa dalam beberapa kali aksi terbuka di lapangan. Keadaan seperti ini jelas-jelas sangat meresahkan, menggelisahkan masyarakat banyak. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, tentunya akan mempengaruhi bahkan mengganggu proses reformasi total maupun proses penyehatan kembali dari berbagai permasalahan bangsa yang sedang dihadapi.

Perintah seperti ini berlaku di daerah lain terhadap siapapun yang jelas-jelas merusak, membakar, menghancurkan aset-aset negara. Siapapun yang secara fisik melakukan kekerasan melawan aparat-aparat penegak hukum. Instruksi

ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, terutama di tempat-tempat yang rawan pelanggaran hukum.

Menindak lanjuti situasi seperti ini, ABRI telah memutuskan untuk melaksanakan suatu langkah proaktif, sehubungan dengan beberapa kasus yang belakangan ini terjadi, terutama yang terjadi di Kupang, Ambon, dan di beberapa tempat di Irian Jaya. Terutama hal ini memerlukan terapi yang khusus, memerlukan suatu penanganan-penanganan yang sifatnya khas. Sebab jika hanya mengandalkan aparat-aparat penegak hukum di wilayah daerah itu, maka akan kewalahan. Sebab itu, akan dibentuk suatu satuan tugas khusus, semacam Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Tetapi bedanya dengan PPRC, satuan ini lebih dititik beratkan pada suatu konsep atau pola operasi pertahanan. Karena belakangan ini yang dihadapi aparat dan masyarakat bukan serangan dari luar, tetapi perilaku masyarakat Indonesia sendiri yang lupa bahwa hukum itu harus dipatuhi dan ditegakkan.

Adanya sebagian masyarakat yang mencederai sesama, bahkan membunuh sesamanya. Membakar fasilitas umum,

rumah penduduk, gereja, masjid, dan tempat-tempat ibadah lainnya, merupakan suatu tindakan yang kelewat batas. Perbuatan yang seandainya dibiarkan akan sangat mencemarkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia Internasional. Satgas yang akan dibentuk ini, akan lebih mengarah pada suatu operasi untuk mencegah menjalarnya kegiatan-kegiatan amuk massa dan sejenisnya. Selain mencegah, operasi ini juga melaksanakan suatu tindakan refresif untuk mencari apa akar permasalahannya dan memberikan hukuman setimpal bagi pelaku-pelaku aksi semacam itu. Bahkan satuan tugas ini akan membongkar secara total apa latar belakang dari kasus-kasus tersebut.

PETA KERUSUHAN PASCA KASUS AMBON

Adanya indikasi kegiatan dan orang-orang yang dicurigai sebagai provokator di beberapa daerah telah menimbulkan dugaan akan munculnya kerusuhan-kerusuhan baru. Bahkan beberapa media massa cetak telah memuat secara gamblang peta kerusuhan pasca amuk massa Ambon, diantaranya Tabloid "OPOSISI" terbitan tanggal 27 Januari 1999 - 23 Februari 1999 dan Tabloid "AKSI" terbitan tanggal 29 Januari 1999

- I Februari 1999.

Daerah yang diindikasikan atau disinyalir berpotensi untuk diledakkan konflik dengan isu SARA ternyata hampir merata di seluruh tanahair. Daerah-daerah yang saat ini sudah mulai memanas adalah wilayah Jawa, Kalimantan Barat, Irian Jaya, dan Aceh. Di pulau Jawa komposisi potensi kerusuhan sudah hampir merata di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat serta DKI Jakarta. Di Jawa Timur, terutama daerah tapal kuda diprediksikan bakal kembali memanas. Diduga aksi kerusuhan itu akan dimulai sekitar bulan Februari 1999 ini. Pemicunya, diduga bias dan kasus Ambon. Tanda-tanda akan terjadi kerusuhan kembali ditegaskan Ketua PWNU Jatim KH Hasyim Muzadi, yang mesinyalir kegiatan provokator yang akan mengobarkan kerusuhan berbau SARA. Hal tersebut diyakininya setelah mendapat laporan dan dua orang Pastur di Malang, bahwa ada pemuda tidak dikenal yang melakukan perbuatan tidak senonoh di sebuah tempat ibadah.

Sedangkan, wilayah Jawa Tengah yang rawan kerusuhan adalah Semarang dan daerah Pantai Utara seperti Pekalongan. Pengalaman konflik SARA sudah

pernah meletus di dua wilayah ini. Diduga, kerusuhan di dua wilayah ini akan terjadi pada bulan Maret 1999.

Untuk wilayah Jawa Barat, bara api kerusuhan mulai terlihat di Bandung.

Untuk wilayah di luar pulau Jawa

KAWASAN RAWAN KERUSUHAN

NO	DAERAH RAWAN	PREDIKSI WAKTU
1.	NABIRE, IRIAN JAYA	Tanggal 7 - 8 Pebruari 1999
2.	BLITAR (JATIM)	Tanggal 15 - 20 Pebruari 1999
3.	SURABAYA (JATIM)	Tanggal 20 - 25 Pebruari 1999
4.	BANDUNG (JABAR)	Tanggal 17 - 18 Pebruari 1999
5.	BESUKI (JATIM)	Tanggal 20 - 25 Pebruari 1999
6.	SEMARANG (JATENG)	Tanggal 15 Maret 1999

* Sumber : Tabloid 'OPOSISI' terbitan tanggal 27 Januari 3 Pebruari 1999

adalah Kalimantan Barat. Diperkirakan kerusuhan yang akan terjadi dapat merambat ke daerah-daerah timur. Daerah Irian Jaya diprediksikan akan terjadi kerusuhan di wilayah Nabire. Isu yang akan dipergunakan masih tetap, yakni Gerakan Papua Merdeka. Sebenarnya kerusuhan di daerah sana itu lebih disulut oleh adanya ketidakpuasan warga asli terhadap para pendatang.

Bom waktu kerusuhan lainnya juga akan menjalar ke daerah Aceh. Pemicunya adalah ketidakpuasan dalam penyelesaian DOM (Daerah Operasi

Militer) dan adanya keinginan sekelompok kecil masyarakat untuk mendirikan negara sendiri. Sementara, Sumatera Selatan atau Palembang yang dikenal sebagai kota transit ini juga rawan konflik terutama soal etnis antara pribumi dan non pribumi. Dugaan adanya upaya pengkondisian daerah-daerah terhadap isu kerusuhan itu merupakan medan bayangan saja. Sasaran sebenarnya dari berbagai kerusuhan itu adalah Jakarta.

ANALISIS

Dari hasil analisis uraian diatas maka

didapat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Tindakan provokasi dalam satu kerusuhan berfungsi mendinamisir suatu keadaan untuk mendorong semua elemen potensial agar bergerak dan bertindak sesuai kepentingan tertentu untuk melakukan tindakan yang bersifat destruktif. Sebagai contoh, dalam kasus Ambon, kapitalisasi isu begitu cepat terjadi. Dari kasus palak memalak yang bersifat kriminal berubah menjadi kasus SARA. Ruang pertempuran meluas secara eskalatif dengan sifat serta target penyerangan yang ditujukan terhadap simbol entitas. Sendi-sendi kehidupan dan kerukunan diguncang, hingga meimbulkan kekacauan sosial.

Mudahnya para provokator itu menyebarkan hasutan dan membangkitkan emosi masyarakat hingga muncul berbagai kerusuhan, disebabkan beberapa hal. Diantaranya yaitu :

Sosial Psikologis Masyarakat

Situasi sosial masyarakat yang memang berpotensi memberi dukungan kondusif untuk memicu terjadinya suatu kerusuhan. Tekanan ekonomi yang

sedermikian berat dan makin hari semakin bertambah berat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat Pemerintah yang kian meluas, tiadanya organisasi sosial atau lembaga informal kemasyarakatan yang dapat dipercaya secara penuh serta memiliki kemampuan untuk memberi arah agar masyarakat bisa mengendalikan segala sikap serta perilakunya untuk menyaring semua informasi serta mengendalikan diri untuk tidak melakukan tindakan destruktif.

Peran Politik Tertentu

Ada pihak atau kelompok yang mempunyai kepentingan politik tertentu dengan memanfaatkan situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Kelompok ini tentunya memiliki kemampuan yang baik untuk bisa mengorganisasikan berbagai tindakannya guna mencapai kepentingannya sendiri. Bukan tidak mungkin kelompok ini memang mempunyai jaringan infrastruktur yang cukup luas atau memiliki operator yang berkemampuan tinggi, sehingga begitu cekatan melakukan tindakan dengan mobilitas yang tinggi. Itu berarti juga ada pihak yang memiliki kemampuan mendanai semua kepentingan dan tindakan mereka.

Adanya penunjukan tokoh-tokoh tertentu sebagai provokator, bahkan dalaang dari semua permasalahannya yang terkait dengan semua kegiatan provokator. Hal itu hanyalah baru sampai dalam tingkat opini publik. Artinya ini baru sampai pada taraf indikasi. Jadi belum bisa dilakukan tindakan penangkapan, karena belum memiliki bukti-bukti yuridis. Tetapi memang penyelidikan sudah dapat dilakukan berdasarkan laporan maupun informasi dan berbagai pihak terutama tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas tidak meragukan terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai contoh, informasi yang diberikan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Kyai Haji Abdurahman Wahid yang biasa dipanggil Gus Dur tentang keterlibatan seorang tokoh pemuda sebagai dalang kerusuhan di Ambon. Arapat Kepolisian telah mengambil tindakan dengan meminta keterangan dari sumber informasi maupun tokoh yang dimaksud. Walau hasil yang didapat baru berupa informasi, namun dapat menambah jumlah data maupun keterangan yang berkaitan dengan kasus kerusuhan tersebut.

Disadari betul bahwa untuk mengungkap dalang dari provokator yang selama ini mengganggu jalannya roda kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah suatu hal yang teramat sulit. Apabila provokator berhasil ditangkap, tentunya hal ini bukannya otomatis dalang dari para provokator akan tertangkap pula. Karena provokator dan dalang dari semua itu memiliki posisi yang sangat berbeda.

Provokator lebih pada orang yang bertugas di lapangan. Tugasnya mengescalasi dan mencoba membawa serta mengarahkan suatu situasi kepada kerusuhan yang lebih melayani kepentingan politik otak kerusuhan. Artinya, dia merupakan perpanjangan tangan dari kalangan maupun otak kerusuhan yang memiliki maksud-maksud politis. Provokator bisa berbeda-beda tanpa diketahui siapa sebenarnya pemberi perintah. Artinya, dia bisa berlapis-lapis, mulai dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling atas. Sehingga provokator yang paling bawah, yang berperan di lapangan, tidak mengetahui siapa yang telah membiayai serta memberi perintah.

ESENSI HASIL BAHASAN DAN TINDAKAN YANG DISARANKAN

ESENSI HASIL BAHASAN

Ada dugaan kuat bahwa para provokator yang telah membuat berbagai kerusuhan itu merupakan suatu jaringan kejahatan (organized crime) yang terorganisir dengan baik (well organized) dan memiliki kemampuan dana yang besar (well financed). Suatu organisasi kejahatan yang memiliki perencanaan (well planning) yang luar biasa, disiplin yang ketat dan keberanian yang hebat sehingga mampu memprovokasi rakyat di berbagai tempat.

Kejahatan terorganisasi yang didukung berada dibelakang berbagai kerusuhan itu tampaknya tidak mudah untuk dilacak apalagi dibongkar. Sosok kelompok kejahatan terorganisasi itu, bahkan hampir-hampir diluar jangkauan tangan-tangan hukum, walaupun berhasil ditangkap ternyata hanya para pelaku dikalangan bawah atau pelaksana di lapangan saja, sedangkan untuk kalangan atas sama sekali belum tersentuh. Kejahatan terorganisasi itu yang sesungguhnya adalah sangat menjaga kerahasiaan. Ia bagaikan 'gunung es'. Puncaknya yang

terlihat tidak dapat dijadikan patokan untuk melihat luas maupun ancaman bahaya kejahatan terorganisasi itu sendiri.

Masyarakat kini sedang mereka-reka dalam alam pikirannya masing-masing, tentang siapa provokator-provokator itu sebenarnya. Mereka sedang menelusuri pihak-pihak yang memiliki keberanian untuk berperan sebagai provokator. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan kemampuan membiayai semua gerakan para provokator.

Perintah tindakan tegas (tembak ditempat) terhadap para perusuh yang telah dikeluarkan Menhankam/Pangab menunjukkan bukti bahwa aparat keamanan tidak main-main dalam menangani kasus kerusuhan. Selain itu dengan adanya upaya untuk membentuk Satgassus (Satuan Tugas Khusus) untuk menangani berbagai kasus yang merongrong wibawa pemerintah dan negara, terutama dalam kasus-kasus kerusuhan. Keputusan tegas dari ABRI ternyata mendapat dukungan yang luas dari kalangan masyarakat. ABRI yang selama awal-awal reformasi banyak mendapat hujatan akibat kesalahan dimasa lalunya, dengan dukungan tersebut seakan-akan mendapat darah

baru dan sehingga muncul gairah baru dalam melaksanakan tugas.

TINDAKAN YANG DISARANKAN

Aparat penegak hukum, terutama Aparat Kepolisian di lapangan tidak ragu-ragu untuk bertindak tegas termasuk tembak ditempat terhadap para pelaku kerusuhan yang tidak mengindahkan setiap peringatan petugas. Kesungguhan sangat diperlukan untuk mengungkap kelompok kejahatan terorganisir yang menggerakkan para provokator untuk mengacau dengan membuat kerusuhan.

Memanfaatkan berbagai informasi yang masuk dan tokoh-tokoh masyarakat dan menanggapi dengan serius serta melakukan cek to recek. Tidak memandang ringan setiap informasi yang masuk, termasuk informasi yang diperoleh dari media massa.

Bagi aparat Kepolisian, kasus kerusuhan dengan aktivitas provokatornya merupakan tantangan tugas yang harus diatasi. Pelaksanaan tugas di tengah-tengah krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, tentunya dirasakan teramat berat. Namun hal tersebut justru menjadi kasus yang

menantang untuk dilacak, bahkan untuk dibongkar dan bila perlu ditempatkan sebagai prioritas utama untuk diatasi. Kegagalan mengungkap kejahatan terorganisir ini, minimal mengajukan para provokator di lapangan ke pengadilan, akan berpengaruh banyak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tetapi sebaliknya, jika Polri berhasil mengungkap dan menangkap Provokator, walau hanya pelaku di lapangan saja, hal tersebut justru akan mengangkat citra polisi di tengah masyarakat.

Demikian analisa singkat tentang "Provokator Kerusuhan" yang merupakan hasil kompilasi dari pemberitaan di mass media cetak. Anev ini dibuat sebagai sumbang saran dan untuk memberikan gambaran analisis tentang sosok provokator yang selama ini selalu menyertai setiap amuk massa yang terjadi di Indonesia.